KOMPAS100 CEO FORUM 2023

Indonesia Maju, dari Semua untuk Semua

Indonesia adil dan makmur adalah mimpi bangsa Indonesia. Industrialisasi berkelanjutan berbasis manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja merupakan tulang punggung dalam mencapainya.

Dunia usaha menjadi vital bersama dengan sejumlah faktor lainnya, seperti sumber daya manusia, riset dan teknologi, serta sistem keuangan. Target dan strategi besar nasional, konsistensi kebijakan, dan dukungan konkret dari pemerintah merupakan panduan bergerak bersama.

Kemajuan Indonesia butuh kolaborasi semua elemen. Dan pada akhirnya, kemajuan Indonesia adalah juga untuk semua elemen. Adil dan makmur.

14TH KOMPAS 100 CEO FORUM POWERED BY: PLN

PRI

Kami perlu "arahan" dari pemerintah untuk membangun ekosistem yang lebih kondusif untuk berinvestasi yang bisa membuat kami lebih produktif. Supaya di saat yang sama, kami bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menekan kemiskinan, sambil menjaga lingkungan. (AGE)

Darmawan Prasodjo
Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

MYE

Program-program *stunting* (tengkes) yang kami lihat saat ini untuk beberapa tahun, antarinstansi, antarpemerintahan, dan antardaerah, itu sangat bervariasi sehingga tidak *targeted* dan tidak ada program yang saling bersinergi, tetapi mungkin saling menduplikasi bahkan kontradiktif. (DIM)

Vera Galuh Vice
President General Secretary Danone Indonesia

BAH

Banyak hal teknis terkait birokrasi dan regulasi di lapangan yang seringkali tidak sinkron dan harmonis. Semua hal ini akhirnya sering membuat pelaku usaha, khususnya di sektor riil, sering mengalami hambatan. (AGE)

Sanny Iskandar
Senior Executive President Office Sinarmas Group

HRS

Kami diminta berkolaborasi dengan semua kementerian dan lembaga (terkait beban biaya produksi perusahaan). Kami harus mulai bersaing dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, agar suatu hari kita bisa punya penerbangan langsung dari Jakarta ke kota-kota besar dunia. (DIM)

Daniel Putut Kuncoro Adi
Presiden Direktur Lion Group

KILAS EKONOMI

Tekan Emisi, Pupuk Kaltim Perbarui Pabrik

PT Pupuk Kaltim dan PT Tripatra Engineers & Constructors menandatangani kontrak kerja sama rancang bangun dan kerekayasaan untuk mengerjakan proyek pembaruan (*revamping*) amonia Pabrik 2, pabrik tertua. "Proyek *revamping* ini selaras dengan prinsip *environment, social,* dan *governance* yang jadi prioritas kami," kata Dirut Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Menata Tabung Elpiji Bersubsidi

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pekerja menata tabung elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram di agen penjualan elpiji di kawasan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu (1/11/2023). Melemahnya rupiah hingga hampir menyentuh Rp 16.000 per dollar AS berisiko membuat subsidi dan kompensasi energi membengkak. Hingga September 2023, total subsidi dan kompensasi energi yang telah dibiayai APBN sebesar Rp 219,8 triliun.

Kemacetan Jalur Pantura Semarang-Demak

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Tersendatnya arus lalu lintas dari Demak menuju Kota Semarang saat melintas di jalur pantura, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (1/11/2023). Dalam beberapa bulan ini, kemacetan arus lalu lintas terjadi sepanjang lebih dari 5 kilometer karena dampak perbaikan jalan dan proyek jalan tol.

Menjadi Tua Sebelum Kaya

Negara-negara yang menua sebelum menjadi kaya merupakan ancaman terhadap kebangkitan Asia. Hambatan terbesar dari fenomena itu terletak pada pasar tenaga kerja. Selain itu, program pensiun yang memadai dapat meminimalkan risiko tersebut.

Tulisan di *The Economist* bertajuk "Poor Asian Countries Face An Ageing Crisis", 12 Oktober 2023, menyebutkan, penduduk Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan negara-negara lain di Asia menjadi tua sebelum menjadi kaya. Untuk memahami potensi buruknya masalah ini, *The Economist* memberikan ilustrasi perbandingan transformasi yang terjadi di Thailand dengan negara-negara lain yang terkenal dengan populasinya yang mulai menua.

Antara tahun 2002 dan 2021, jumlah penduduk Thailand berusia 65 tahun ke atas meningkat dari 7 persen jadi 14 persen. Transisi yang sama memakan waktu 24 tahun bagi Jepang, Amerika Serikat 72 tahun, dan Perancis 115 tahun. Tidak seperti negara-negara tersebut, Thailand menjadi tua sebelum menjadi kaya. Produk domestik bruto (PDB) per kapita Thailand pada 2021 adalah 7.000 dollar AS. Ketika populasi Jepang memiliki usia yang sama, pada tahun 1994, PDB per kapita mereka hampir lima kali lipat lebih tinggi.

Permasalahan yang terjadi di Thailand itu menggarisbawahi bahwa tren regional memiliki signifikansi ekonomi dan sosial yang sangat besar. Kekayaan orang Vietnam sekitar setengah kekayaan orang Thailand. Penduduk Vietnam dan Thailand mungkin hanya butuh waktu sekitar 17 tahun untuk berubah dari "menua" menjadi "tua".

Di negara-negara yang penuaannya memakan waktu lebih lama, seperti Indonesia (26 tahun) dan Filipina (37 tahun), tingkat pendapatannya bakal jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain.

Asia Tenggara sebagai suatu kawasan akan "menua" pada 2042. Adapun Asia Selatan akan bertahan selama hampir satu dekade lagi, tetapi dengan kesenjangan regional yang lebih besar. Kecepatan transisi demografi Asia merupakan konsekuensi dari perkembangan masyarakatnya. Industrialisasi dan perubahan norma-norma sosial telah menurunkan tingkat kesuburan meskipun teknologi dan layanan kesehatan yang lebih baik mampu memperpanjang umur penduduk.

Menurut Economic Advisor di Bank Pembangunan Asia (ADB), Donghyun Park, negara-negara yang menua sebelum menjadi kaya merupakan ancaman terhadap kebangkitan Asia. Hambatan terbesar dari fenomena itu terletak pada pasar tenaga kerja. Seiring bertambahnya usia suatu negara, jumlah angkatan kerja pun menyusut.

Di Indonesia, laporan "Statistik Penduduk Lanjut Usia 2022" yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Desember 2022, dalam kurun 2010-2021, persentase penduduk lanjut usia (lansia) telah meningkat 3 persen menjadi 10,82 persen. Umur harapan hidup di Indonesia juga naik dari 69,81 tahun pada 2010 menjadi 71,57 tahun pada 2021.

Merujuk data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta aktif baru mencapai 38,8 juta orang. Padahal, jumlah angkatan kerja di Indonesia melebihi 146 juta orang. Dari jumlah pekerja yang tercatat sebagai peserta aktif itu, peserta yang terdaftar dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) sekitar 17 juta orang dan program Jaminan Pensiun (JP) sekitar 14 juta orang. Pada saat bersamaan, sampai saat ini yang tercatat sebagai peserta program dana pensiun baik di dana pensiun pemberi kerja (DPPK) maupun dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) hanya sekitar 4 juta orang.

Upah minimum

Sebelumnya, pada pertengahan Oktober 2023, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengeluarkan pernyataan yang akhirnya viral di media sosial. Pernyataannya, gaji pekerja minimal yang harus diperoleh agar Indonesia jadi negara maju 2045 adalah Rp 10 juta per bulan per orang.

Respons publik beragam, mulai dari mempertanyakan perusahaan mana yang sanggup membayar gaji sebesar itu sampai keluhan kenaikan biaya hidup yang tidak sejalan dengan upah minimum. Alih-alih memikirkan pensiun dengan tenang, mampu bertahan hidup di situasi seperti sekarang ini saja sudah bagus.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, Rabu (1/11/2023), mengemukakan, saat ini masih ada perusahaan memberikan upah minimum kepada pekerja meskipun pekerja itu sudah bekerja di atas satu tahun.

"Kenaikan upah minimum per tahun saja semakin tidak bisa mencapai di atas 5 persen dengan berbagai faktor penyebab, seperti pengaruh ketidakpastian ekonomi global. Daripada pemerintah fokus pada nominal gaji, perhatiannya dipusatkan pada upaya meningkatkan kepesertaan JHT, JP, beserta persentase iurannya," paparnya.

Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Mulyadi menilai, rendahnya kepesertaan program dana pensiun disebabkan oleh pemberi kerja tidak membentuk lagi DPPK setelah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan. Ada pula pemberi kerja yang telah mendirikan DPPK mengalami kesulitan keuangan sehingga lembaga itu bubar.

Sementara itu, menurut Social Protection Programme Manager International Labour Organization (ILO) Indonesia dan Timor Leste, Ippei Tsuruga, Indonesia tidak memiliki program jaminan pensiun nasional yang wajib diikuti seluruh penduduk Indonesia. Sejauh ini, keikutsertaan dalam JP bersifat wajib bagi perusahaan skala besar dan menengah. Sebagian besar pekerja penerima upah di perusahaan mikro tidak tercakup dalam skema pensiun. Pekerja bukan penerima upah (informal) tidak diperkenankan mengikuti JP. Begitu pula, 30 juta ibu rumah tangga di Indonesia tidak bisa menjadi peserta JP ataupun JHT.

Program nasional

Ippei mengatakan, Indonesia perlu segera membentuk program jaminan pensiun nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Sebab, program seperti itu akan menjamin seluruh penduduk lansia punya pendapatan uang pensiun reguler untuk menjaga mereka hidup dalam standar yang layak. Jika tidak ada program seperti itu, penduduk usia muda yang masih bekerja akan memikul beban yang lebih berat untuk menanggung penduduk lansia.

Ippei memberikan ilustrasi. Saat ini, populasi penduduk usia kerja (15-59 tahun) tidak akan tumbuh banyak dari 173 juta pada tahun 2020 menjadi 194 juta pada 2050, tetapi populasi lansia (60 tahun ke atas) akan meningkat pesat sebesar 27 juta pada tahun 2020 menjadi 69 juta pada 2050. Di tingkat rumah tangga, jumlah anak-anak lebih sedikit, dan jumlah orang lanjut usia lebih banyak. Di tingkat nasional, penduduk usia kerja mungkin harus membayar lebih banyak pajak atau iuran untuk mendukung penduduk lansia.

Saat peluncuran *white paper* bertajuk "Dari LPEM bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029", Jumat (27/10), di Jakarta, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Chaikal Nuryakin berpendapat, agar bisa merealisasikan mimpi Indonesia Emas 2045, kelas menengah yang harus disiapkan adalah kelas menengah yang kuat, inovatif, dan produktif. Selain jaminan sosial, pemerintah juga perlu meningkatkan kesetaraan kesempatan dan akses pendidikan ataupun kesehatan yang berkualitas, pekerjaan sektor formal, dan infrastruktur dasar. (MEDIANA)

PELUANG BISNIS

Sektor Tertentu Berpeluang Melonjak karena Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS — Bisnis sektor percetakan, periklanan, media, transportasi, logistik, makanan dan minuman, serta garmen berpeluang melonjak karena penyelenggaraan pemilu. Masifnya belanja iklan dan kampanye dari ribuan calon anggota legislatif, calon kepala daerah, bahkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bisa melambungkan omzet usaha mereka. Pada ujungnya, belanja ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Dihubungi pada Rabu (1/11/2023), Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual mengatakan, penyelenggaraan pemilu akan mendorong belanja jumbo berbagai aktivitas politik para calon yang berkompetisi.

Selain pemilihan presiden, mengutip data Litbang *Kompas*, tercatat ada 541 daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, yang akan menggelar pilkada pada November 2024. Tahun depan juga akan ada ribuan calon yang berkompetisi di pemilu legislatif. Artinya, akan ada ribuan calon yang melakukan aktivitas politik sehingga mendorong gelontoran belanja iklan dan kampanye.

Untuk penyelenggaraan pemilu, Komisi II DPR juga sudah menetapkan anggaran penyelenggaraan pemilu bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 27,39 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 11,6 triliun (*Kompas*, 12/9/2023).

Belanja jumbo ini akan tersalurkan ke sektor-sektor ekonomi, antara lain percetakan, periklanan, media, transportasi, logistik, makanan dan minuman, serta garmen.

"Ini akan mendorong sektor-sektor ekonomi itu mencatat kinerja yang lebih tinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya," ujar David.

Lonjakan pendapatan di sektor-sektor tersebut diperkirakan mulai terjadi saat masa kampanye, yakni 28 November 2023-10 Februari 2024. Apabila terjadi putaran kedua pemilu presiden, kampanye berikutnya dijadwalkan pada 2-22 Juni 2024. Itu belum termasuk kegiatan pemilihan kepala daerah pada November 2024.

> ***Pemilu ini diharapkan bisa jadi semacam obat tambahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.***
>
> David Sumual

David menjelaskan, peningkatan jumlah uang yang beredar terkait belanja pemilu itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi dalam negeri. Gelontoran dana yang besar itu akan merangsang pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan.

Perhitungannya, penyelenggaraan pemilu diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 0,05-0,1 persen. Adapun tahun depan, pemilu akan mendorong pertumbuhan ekonomi 0,25-0,3 persen.

"Pemilu ini diharapkan bisa jadi semacam obat tambahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri saat situasi global saat ini sedang penuh ketidakpastian," ujar David.

Mandiri Sekuritas pada Januari 2023 juga pernah merilis riset yang memperkirakan akan ada gelontoran dana terkait pemilu sebesar Rp 118,9 triliun hingga Rp 270,3 triliun yang beredar di masyarakat. Perhitungan itu didasarkan dari total rata-rata belanja pemilu dari 232.770 kandidat yang akan memperebutkan 19.737 kursi jabatan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, di Pemilu 2024.

Penyelenggaraan pemilu 2024 akan menginjeksikan dana yang akan beredar di masyarakat sebanyak 0,6-1,3 persen dari produk domestik bruto.

Lancar dan kondusif

Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, penyelenggaraan pemilu memang memberikan dorongan kenaikan omzet dunia usaha. Namun, itu tidak merata dan hanya dinikmati sektor tertentu.

Terlepas dari adanya kemungkinan tambahan daya dorong ekonomi, Shinta menawarkan perspektif lainnya. Menurut dia, penyelenggaraan pemilu justru bisa berpotensi menciptakan perlambatan ekonomi karena ada kondisi ketidakpastian iklim usaha dan investasi.

Maka, ia menyebutkan, dunia usaha lebih berharap pemilu bisa berjalan lancar dan kondusif. Para peserta diharapkan bisa berkompetisi dengan jujur dan sportif menerima hasil.

Sebab, dunia usaha membutuhkan keadaan sosial yang aman dan kondusif. Ketika terjadi gejolak, aktivitas ekonomi bisa terganggu.

Menurut Shinta, Pemilu 2024 sangat penting karena menentukan arah perekonomian pada tahun mendatang. Sebab, saat ini adalah momen menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi agar Indonesia kelak berhasil menjadi negara berpendapatan tinggi atau maju pada tahun 2045 atau 22 tahun lagi. (BKY)